

**INTERAKSI PEMERINTAH DESA DENGAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN**

(Studi Kasus Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Provinsi

Jawa Tengah)



Disusun Oleh:

RAY PALMER

19520118

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL
INTERAKSI PEMERINTAH DESA DENGAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata I Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” YOGYAKARTA



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STARATA I
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2023






HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 mei 2023
Jam : 09.00
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta


TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. R Yulianus Gatot, M.si Ketua penguji / pembimbing	
2. Dr. Rijel Samaloisa Penguji Samping I	
3. Analius Giawa S.IP.,M.si Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samaloisa



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAY PALMER

Nomor Induk Mahasiswa : 19520118

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang **BERJUDUL INTERAKSI PEMERINTAH DESA DENGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**. Benar-benar merupakan hasil sendiri. Hal-hal yang bukan karya dalam Skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Mei 2023

Yang menyatakan



RAY PALMER
19520118

MOTTO

“Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(FILIPPI 4: 13)

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKU mengenal kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada mu hari depan yang penuh harapan.

(YEREMIA 29: 11)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”.

(AMSAL 23: 18)

“selama tidak menyerah, artinya anda tidak akan gagal. Sebab kunci kegagalan adalah kata menyerah itu sendiri”.

(BJ Habibie)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Ijon Angkum dan Ibu Bapang Ajen, yang memberikan semua yang mereka punya baik materi, kasih sayang, semangat dan cinta kasihnya tanpa meminta balas yang menjadi motivasi saya untuk lebih semangat kedepannya dan tidak lupa mendoakan serta restunya dari awal sampai detik ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Drs. RY. Gatot Raditya, M. Si. Terima kasih kepada bapak yang telah sabar dalam membimbing saya dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, biarlah Tuhan yang membalas segala kebaikan bapak.
3. Kepada Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.si selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
4. Kepada saudara/i saya Agustriani, Dewi Lestari, Merry Natalias, Cleokto yang memberikan semangat dan dukungannya selama ini.

5. Kepada partner saya Cici Anggraini yang selalu menemani, memberikan support dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
6. Teruntuk Desa Leses khususnya kepala desa, seluruh perangkat desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam penelitian ini yang telah memberikan waktu dan tempat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman saya seperjuangan yang sama-sama menyelesaikan skripsi ini: Lusi Ratna, Rafli, Anggit, Eky, Rival Grece, Mei, Intan, Reza, Sella, Sri, Andilau, Buma, Grup Wahgelaseh, dan teman-teman Asrama Tenguyun Putra/i Bulungan dan seluruh teman yang tidak disebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas motivasi dan dorongan yang kalian berikan kepada saya, biarlah Tuhan yang membalas segala kebaikan kalian.
8. Kepada kampus tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta tempat saya belajar, menuntut ilmu, dan mengapai cita-cita saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Allah Yesus Kristus yang telah memberikan anugrah dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi yang berjudul: INTERAKSI PEMERINTAH DESA DENGAN LEMBAGA PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PENYELENGGARAN PEEMRINTAHAN DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Srata (1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, arahan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si. selaku dosen pembimbing penulisan yang telah memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.si selaku dosen pembimbing akedemik.

5. Kepada orang tua saya tercinta, dan tersayang Bapak Ijon Angkum dan Ibu Bapang Ajen.
6. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Literatur Review.....	8
G. Kerangka Konseptual	14
1. Interaksi	14
2. Pemerintah Desa.....	19
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	22
4. Penyelenggaran Pemerintahan Desa.....	28
5. Governance.....	29
H. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Lokasi Penelitian	31
3. Unit Analisis.....	31
4. Teknik Pengumpulan Data	33

5. Teknik Analisis Data	33
BAB II	36
A. Sejarah Desa Leses.....	36
B. Geografi Desa Leses	37
1) Letak.....	37
2) Luas	38
3) Wilayah	39
C. Kondisi Demografi.....	40
D. Kondisi Ekonomi	44
E. Pemerintah Desa.....	46
1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Leses	47
2. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	47
BAB III	49
A. Mengenai Interaksi Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	49
BAB IV	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
LAMPIRAN DOKUMENTASI	58
DAFTAR PUSTAKA	xiv
A. Identitas Informan	xvii
B. Daftar Pertanyaan	xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Deskripsi Narasumber	32
Tabel 2. 1 Kepala Desa yang Pernah Menjabat di Desa Leses	37
Tabel 2. 2 Desa Leses yang Memiliki Wilayah Bawahan Sejumlah 2 (dua) Dusun	39
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	42
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	43
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	43
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	45
Tabel 2. 8 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Leses Saat ini.....	47
Tabel 2. 9 Susunan Organisasi Badan Permuyawaratan Desa (BPD)	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Desa Leses	40
---	----

INTISARI

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat menyebut bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam bidang menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan hubungan pemerintah desa Leses dikatakan baik juga pemerintah desa dan LPMD bekerja sama dengan baik agar masyarakat dalam mengadakan musrenbang ataupun musyawah di tingkat desa aktif dan mau terlibat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan secara bersama-sama. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana interaksi pemerintah desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan?

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu Mendeskripsikan Interaksi Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan melalui Observasi, Wawancara mendalam dan Dokumentasi seperti RPJMDes. Teknik analisis data yang digunakan yakni Reduksi Data, Penyajian Data, Penarik Kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini Interaksi pemerintah desa dengan LPMD sudah berjalan dengan baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam pengambilan keputusan masyarakat ikut andil bagian dalam menentukan kebijakan ataupun keputusan secara bersama-sama pemerintahan desa demi terwujudnya pembangunan yang partisipatif dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*.

Kata kunci: Pemerintah Desa, LPMD, Penyelenggaraan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengubah dan mendorong masyarakat desa untuk lebih agresif membangun desanya. Apa yang dilakukan warga desa-desa jika diakumulasikan dalam gerakan nasional atau capai pembangunan tentu adalah hal yang mustahil dicapai negara pada masa-masa yang lampau, atau bahkan negara lain. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa, Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik dalam Pembangunan Desa di perlukan kerja sama baik Pemerintah Desa dengan LPMD agar dapat terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Termonologi *good governance* memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari *good governance*. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (nasional *prosperity*). Pemerintahan Desa harus lebih fokus memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Namun yang dilakukan pemerintah Desa dengan ketua LPMD dalam proses penyelenggaraan pemerintah berbeda, yang sama-sama memposisikan diri untuk tetap ingin dalam Musrenbang

membahas 1 program saja dimana Pemerintah Desa dan LPMD mempunyai kepentingan masing-masing dalam program kerjanya.

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra dari pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPMD dibentuk dengan maksud untuk membantu pemerintah desa dalam memperdayakan masyarakat desa pada berbagai aspek pembangunan. Sebelum disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas lembaga pemberdayaan masyarakat:

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
2. Mengerakan swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat:

1. Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
4. Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
5. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
7. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
8. Penumbuhkembang dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
9. Pengendalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

Seperti hal yang terjadi di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan LPMD belum dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat Desa dalam Musrenbang, sehingga LPMD tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat Desa Leses, hal ini disebabkan kurang korelasi atau kerja sama antara Pemerintah Desa dengan LPMD untuk membuat masyarakat terlibat aktif dalam Musrenbang Desa. Peran masyarakat dalam partisipasi turut ambil penting dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan. Menurut (Dr. Made:45) partisipasi merupakan melibatkan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Dari pernyataan itu maka partisipasi adalah hal ikutnya seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Namun praktik masyarakat di Desa Leses kurang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Musrenbang), masyarakat sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing dan kurang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan sulit untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Desa dan LPMD agar membuat masyarakat Desa aktif dalam partisipasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Desa Leses. Musrenbang sangat bermanfaat bagi masyarakat dapat menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat desa kedepannya yang akan menjadi evaluasi bagi Pemerintah Desa.

Kebijakan Pemerintah tentang Desentralisasi fiskal berupa Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan kepada desa, akan

menimbulkan dampak yang besar bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintah Desa harus bijak dalam mempergunakan Desentralisasi fiskal untuk program-program penguatan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan menjadi berkah jika di kelola dengan baik, namun akan menjadi musibah jika dalam pengelolaannya tidak tepat sasaran. (Andi Pitono dan Kartiwi).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Leses Tahun 2020-2025 adalah perencanaan desa untuk periode 6 tahun (enam) Tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program pembangunan desa serta sasaran-sasaran strategi yang ingin dicapai oleh desa selama 6 tahun (enam) Tahun ke depan. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, maka peradaan RPJM Desa merupakan satu bagian utuh dan merupakan kerangka acuan dalam mewujudkan kinerja pemerintah desa, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dan atau akan ditetapkan serta keberadaan akan di jadikan pedoman seluruh lembaga dan masyarakat desa.

Hasil dari Musrenbang itu mengarah kepada Visi dan Misi untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Desa yaitu “Mewujudkan Desa Leses Yang Agamis, Aman, Bermartabat, Sehat Dan Sejahtera”. Keberhasilan

pembangunan di Desa Leses selain dilaksanakan oleh jajaran Pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Desa Leses sesuai Visi dan Misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat segera terwujud.

Dengan adanya program pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa harus berjalan sesuai dengan hasil Musrenbang yang telah ditetapkan bersama-sama, di sisi lain Pemerintah Desa dan LPMD juga harus memperhatikan pembangunan yang mutlak diperlukan masyarakat Desa, dan agar dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan digunakan sebaik-baiknya agar tujuan pembangunan menuju ke arah yang positif dan terarah dengan baik pula agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Dalam penelitian ini menggunakan Perspektif *Governance* yang mana berusaha untuk mengetahui interaksi Pemerintah Desa Leses dengan LPMD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Interaksi Pemerintah Desa dengan LPMD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah: Mengetahui lebih dalam Mengenai Interaksi Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Penyelenggaran Pemerintahan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk Mendeskripsikan Interaksi Pemerintah Desa dengan LPMD dalam penyelenggaran Pemerintahan di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk kegunaan Teoritis

Secara Teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khusus nya dalam ilmu pemerintah tentang pemerintahan di Desa.

2. Untuk kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas khususnya Desa Leses mengenai Relasi Pemerintah Desa dengan LPMD dalam mewujudkan penyelenggaran pemerintahan.

3. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan kuliah program starsa satu (1) dalam ilmu pemerintahan di STPMD "APMD" YOGYAKARTA.

F. Literatur Review

Berdasarkan penelusuran pustaka penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait yaitu:

Pertama, jurnal fisip volume 4 nomor 2 oktober 2017 penelitian yang dilakukan Ravi Santoso dengan judul relasi antar kelembagaan desa dalam pembangunan infratraktur desa mayang pongkai kecemantan kampar kiri tengah kabupaten kampar tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah program pembangunan desa mayang pongkai ini pada prinsipnya direncanakan melalui musyawarah yang baik oleh pemerintah desa mayang pongkai. Akan tetapi hasil musyawarah pembangunan yang dilakukan tidak berjalan dengan seharusnya dimana masih sulitnya mendapatkan pasrtisipasi masyarakat ditambah lagi dengan adanya hubungan yang tidak baik antara lembaga desa yang ada di desa mayang pongkai ini dan belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di desa mayang pongkai ini di karenakan oleh faktor-faktor sumber daya aparatur desa itu sendiri, belum optimalnya pengelolaan sumber dana desa, dan juga belum optimalnya tingkat pastisipasi masyarakat dan faktor relasi kerja sama anatar tiap lembaga dalam menjalankan program pembangunan ini.

Kedua, jurnal Goevenalitas volume 3 nomor 2 tahun 2022 penelitian yang dilakukan oleh Lerry Chandra dan Jaka Triwidaryanto dengan judul Problema relasi kuasa antara lembaga adat dengan pemerintah desa. Pada penelitian ini menggunakan metode eksplanatif kualitatif. Data penelitian ini terdiri dari data

primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung di desa. Dalam kajian ini, data primer diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian relasi antara lembaga adat dengan pemerintah desa hanya bersifat formalistik-lembaga adat dibutuhkan ketika pemerintah desa tidak mampu mengatasi permasalahan konflik antar etnik. Lembaga adat dibutuhkan pemerintah desa atau pemerintah daerah dalam rangka mendatangkan daya tarik wisatawan, namun mereka tidak memiliki akses dalam pengambilan keputusan pemerintah desa. Interaksi antara pemerintah dengan lembaga adat dalam bentuk forum kerjasama melalui musyawarah mufakat untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai budaya setempat.

Ketiga, Jurnal Civic Hukum Volume 4, Nomor 2, November 2019, Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, dan Trisakti Handayani. Dengan judul “Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang”. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskriptifkan efektivitas tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat desa bululawang, untuk mendeskripsikan kendala dari kinerja LPMD dalam pelaksanaan pembangunan desa dan untuk mendeskripsikan solusi dari permasalahan kinerja LPMD dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pada penelitian ini ini menggunakan tiga teori yakni efektivitas, lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data, yakni *observasi*, *wawancara*, dan *dokumentasi*. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan di desa

bululawang. Adapun hasil dari penelitian ini yang dilakukan di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur mengenai Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaannya dapat melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari berhasilnya pembangunan sarana dan prasarana maupun pembangunan non sarana dan prasarana. Kemudian kualitas sumber daya manusia lebih baik bisa dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan kerukunan umat beragama. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa bululawang dapat dikatakan “efektif”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pembangunan partisipasi dan meningkatkan kualitas SDM sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam kemajuan tingkat dan tamtam pendidikan masyarakat yang sudah lebih maju, peningkatan pendapatan ekonomi yang naik dan tahun ke tahun, dan pemberian fasilitas dari desa yang sudah memadai, efektifitas dan efisien. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala dari permasalahan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bululawang terdapat pada kurangnya partisipasi masyarakat mulai proses perencanaan hingga pengendalian pembangunan yang masih itu-itu saja, tidak adanya pemerataan partisipasi masyarakat. Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan lebih menekankan atau meningkatkan langkah sosialisasi ke masyarakat awam supaya sadar betapa pentingnya meningkatkan sumber daya manusia.

Keempat, penelitian Ariyanto Fratama yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Tahun 2021, volume 9, Nomor 1, yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampak Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur”. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan melauai studi pustaka dan penelitian lapangan, menggunakan *observasi*, *wawancara* mendalam dan pencatatan *dokumenter*. Analisis data yang digunakan yakni analisis data model interaktif

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya kemampuan LPM dalam merencanakan pembangunan, kemampuan LPM menggerakkan keterlibatan masyarakat dan kapasitas LPM untuk menjalankan, menilai ulang kegiatan pembangunan yang ada di desa. Penyebabnya ialah kurang aktifnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri.

Kelima, penelitian Didik G. Suharto dimuat dalam jurnal Bina Praja Ilmu Adminitrasi, Tahun 3 september 2012 Volume 4, Nomor 3 dengan judul “Penyelenggaran Pemerintahan Desa Dalam Perspketif Desentralisasi Adminitralization And Political Decentralization”. Penelitian ini mennggunakan

deskriptif kualitatif di dalam penelitiannya, metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, teknik wawancara dalam penelitian ini adalah *teknik wawancara mendalam (indepth interview)* melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai, *teknik observasi* kegiatan yang menjadi objek observasi adalah berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa; teknik dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintah desa dalam perspektif desentralisasi administrasi dan politik.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah menekankan bahwa pelaksanaan desentralisasi perlu memperhatikan karakter, kapasitas, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga desentralisasi atau penyerahan kewenangan/urusan tidak diberlakukan sama untuk setiap desa, setiap desa berbeda keperluan sesuai dengan kondisi alam dan daerah nya.

Keenam, penelitian Goestyari Kurnia Amantha dimuat dalam jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 47 Nomor 1 juni 2021 dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang). Tujuan penelitian ini ialah mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat melalui sumber mata air panas yang ada di Desa Way Urang. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan yakni observasi, langsung kelapangan, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian penulis yang telah dilakukan pemerintah Desa Way Urang kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran belum mampu

menjalankan perang sebagai stabilisator, inovator, pelopor dan moderator dalam pengelolaan sumber Mata Air Panas Desa Way Urang. Hal tersebut disebabkan karna belum adanya komunikasi dan kordinasi dengan Dinas Parawisata Kabupaten setempat dan pada dasarnya Sumber Air Panas tersebut berada di dalam tanah milik masyarakat.

Ketujuh, jurnal Fatimah Azis dan Irmawati Tahun september 2021, volume 1, nomor 2 dimuat dalam Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial dengan judul penelitian “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa (Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, faktor pendukung dan penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini informan dipilih langsung oleh peneliti yang disebut sasaran penelitian berdasarkan karakteristik informan yang telah ditetapkan yaitu Kepala Desa, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan masyarakat desa. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah cara observasi, wawancara.

Hasil penelitian ini adalah LPM memiliki peran penting dalam keberhasilan di dalam setiap pembangunan yang dilakukan di desa, diketahui bahwa peran LPMD yaitu membantu pemerintah desa dalam merancang, dan melaksanakan setiap pembangunan yang ada. Namun dari hasil yang ada dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa peran LPM belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya meskipun dari segi pembangunan fisik dan non-

fisik sudah ada perubahan. Faktor penghambat peran LPM dalam pembangunan desa yakni kurangnya partisipasi masyarakat dan transportasi. Faktor penghambat peran LPM dalam pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa adalah sumber daya aparatur desa dan adakan rapat.

Dari beberapa literatur review di atas merupakan tolak ukur dari penelitian yang saya ambil atau sebagai batu loncatan untuk penelitian yang saya akan gunakan. Dan perbedaan penelitian saya dan penelitian terdahulu yaitu dimana penelitian saya bahwa pemerintah desa dengan LPMD sudah menjalankan tugas dan fungsinya dimana masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan di desa dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan ataupun menentukan kebijakan secara bersama-sama, namun sebagian masyarakat tidak ikut serta dalam musyawarah yang di adakan di desa hal tersebut bisa dilihat dari hanya 60% masyarakat yang hadir dalam kegiatan musyawarah di desa Leses.

G. Kerangka Konseptual

1. Interaksi

Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Dalam pengertian interaksi difokuskan kepada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi diantara orang lain atau institusi, oleh karena itu interaksi hanya kan terjadi bila terjadi bila terdapat reaksi dari kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya. Atau dengan kata lain, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.

Homans (dalam Ali, 2004:87) mendefinisikan interaksi sosial sebagai suatu kejadian ketika aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya.

(Soerjono Soekanto), berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial.

1) Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Interaksi yang umumnya terbentuk kerjasama (*corporation*) dan bahkan pertikaian atau pertentangan (*competition*). Gillin dan Gillin dalam Muhlis Madani (2011:49-50) menyatakan penggolongan proses sosial yang timbul akibat adanya interaksi sosial:

a. Proses interaksi asosiatif terbagi dalam 2 bentuk sebagai berikut:

1) Kerjasama

Menurut Soerjono Soekanto (2006, hlm 66) “kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu” pendapat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kerja sama merupakan bentuk hubungan antara beberapa orang yang sedang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama.

2) Akomodasi

Bentuk interaksi lainnya yang termasuk dalam proses asosiatif adalah akomodasi (*accomodation*). Bentuk ini pada dasarnya adalah mengatasi pertentangan atau konflik yang terjadi antara organisasi dengan

yang lainnya tanpa menimbulkan kalahan atau kerugian organisasi yang terlibat di dalamnya. Menurut Soerjono (2006:69) dalam akomodasi terdapat beberapa tujuan yaitu: pertama mengurangi pertentangan yang terjadi dengan menghasilkan solusi baru yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dan kedua untuk mengatasi atau mencegah terjadinya konflik sebagai akumulasi pertentangan yang terjadi. Sementara itu, proses disosiatif adalah operasional proses yang secara mandasar dapat diartikan sebagai upaya orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Proses disosiatif ini dapat diidentifikasi dalam tiga bentuk yaitu persaingan (*competition*), kontraensi (*controvention*), dan pertentangan atau pertikaian (*conflict*).

b. Proses interaksi disosiatif terbagai dalam bentuk-bentuk:

1) Persaingan

Gillin dan Gillin dalam Muhlis Madani (2011:52), menjelaskan bahwa persangan dapat diartikan sebagai satu proses Sosial dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum, baik perseorangan maupun kelompok dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.

2) Kontravensi

Proses disosiatif dalam bentuk Kontravensi terjadi antara bentuk persaingan dan pertentangan atau perikaian yang di tandai oleh sikap atau perilaku ketidaksukaan yang sembunyi terhadap orang perorang atau kelompok namun tidak sampai mengarah kepada pertikaian ataupun jika terjadi cenderung tertutup. Wiese dan beker dalam buku Muhlis Madani (2011 hlm 52-53) menjelaskan terdapat 5 bentuk dari kontravensi yaitu:

- a) Umum, aktivitas yang tergolong dalam bentuk ini adalah penolakan, protes dan perlawanan.
- b) Sederhana, dalam bentuk ini aktivitas dilakukan antara lain mengecam, meyangkal lawan, dan memfitnah.
- c) Intensif, bentuk kontravensi yang meliputi aktivitas penghasutan dan menyebarkan desas-desus.
- d) Rahasia, bentuk kontravensi melalui memberikan rahasia kelompok kepada pihak lawan atau penghianatan.
- e) Taktis, bentuk kontravensi melalui aktivitas untuk mengganggu pihak lawan atau kedua.

3) Pertentangan atau pertikaian

Proses disosiatif dalam bentuk yang ekstrem adalah pertentangan atau perikaian. Menurut Wiese dan Backer dalam Muhlis Madani (2011:53) yaitu suatu proses dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Pertentangan tidak selalu memberikan dampak negatif namun juga positif yang di tentukan oleh permasalahannya serta struktur sosial masyarakat menyangkut tujuan, dan kepentingan masing-masing. Dampak positif bagi mereka yang mempunyai kepentingan tertentu hal itu terjadi karna ia dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut.

2) Faktor-Faktor Interaksi Sosial

Interaksi sosial sangat berguna untuk menelaah dan mempelajari banyak masalah di dalam kehidupan manusia. Menurut Widiayanti (2005:35) manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai makhluk individual mempunyai dorongan atau motif untuk mengadakan interaksi dengan dirinya sendiri, sedangkan manusia sebagai makhluk sosial mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Adanya dorongan atau motif sosial pada manusia maka manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan hubungan atau untuk mengadakan interaksi sosial.

Interaksi sosial akan terjadi apabila ada komunikasi. Menurut Soerjono Soekanto (2012:61) dengan adanya komunikasi, sikap-sikap dan perasaan-perasaan suatu kelompok manusia atau orang perseorangan dapat diketahui oleh kelompok-kelompok lain atau orang-orang lainnya. (Hariyanto, 2011) interaksi sosial antar individu merupakan proses yang rumit dan kompleks yang melibatkan faktor-faktor psikologis adalah sebagai berikut:

- a. Imitasi adalah meniru orang lain, mulai dari sikap, perilaku, gaya, cara berfikir, penampilan, kemampuan, keterampilan, dan lain-lain. Imitasi yang baik perlu didahului oleh penerima, penghormatan, penggunaan, dan lain-lain sesuatu yang hendak di terus tersebut.
- b. Sugesti adalah mempengaruhi seseorang atau suatu pandangan, pemahaman, sikap dan sebagainya yang menerima sugesti dalam keadaan tidak berpikir rasional karena diberi sugesti oleh orang yang dikagumi, dihormati, berwibawa, karismati, pemuka agama, penguasa, golongan mayoritas, dan lain-lain sebagainya.
- c. Simpati adalah ketertarikan seseorang kepada orang lain yang seolah-olah merasakan perasaan orang lain. Empati adalah rasa simpati yang sangat mendalam yang mampu memberikan pengaruh pada kejiwaan dan atau fisik seseorang.
- d. Identifikasi adalah imitasi yang mendalami sehingga ingin sama dengan pihak lain baik sengaja maupun tidak sengaja.

2. Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Pemerintah Desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan kata lain, pemerintah desa dapat dikatakan sebagai Lembaga perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan daerah yang bertugas untuk menjalankan urusan pemerintahan di desa yang akan berdampak pada perkembangan pembangunan dan kepentingan nasional.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kewenangan desa mencakup, kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah kabupaten. Kewenangan desa yang diatur berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang kewenangan Desa. Penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa, pencalonan dan pemilihan serta penetapan perangkat Desa, pembentukan dan Badan Permusyawaratan Desa. Permusyawaratan Desa, penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan belanja desa, pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, penetapan peraturan desa, penetapan kerjasama antar desa, penetapan pinjaman desa. Penetapan dan pembentukan badan usaha milik desa, pengeluaran izin skala desa, penetapan tanah khas desa, pemeliharaan keamanan dan keterlibatan masyarakat, pengelolaan dana atas bagi hasil, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota.

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang. BPD merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwilayah wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Berdasarkan pemaparan tentang pemerintah desa di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah kumpulan orang-orang atau individu-individu yang berperan sebagai pihak penyelenggaran atau yang melaksanakan roda pemerintahan yang ada di desa. Pemerintah desa terdiri dari perangkat inilah yang membantu dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan proses pembangunan yang ada di desa. Pemerintah desa inilah yang mempunyai andala besar dalam merumuskan kebijakan dan upaya yang tepat agar tujuan suatu desa dapat dicapai dengan baik. Oleh karena itu posisi pemerintah harus diisi dengan oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya dan juga orang-orang yang mengenal desanya dengan baik

sehingga mereka mampu merumuskan dan menjalankan upaya untuk mensejahterakan desa dan mencapai tujuan.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan menurut Suhendra (2003:17) adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergitas, mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolusif, dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang saling menghormati tanda ada yang merasa asing dalam komunitasnya. Istilah pemberdayaan menurut Sedarmayati (2005:47) dipergunakan secara lebih luas oleh berbagai lapisan masyarakat yang berarti mengembangkan potensi ekonomi rakyat, hakekat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, sehingga terpelihara tantangan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya asing yang implementatif dalam pembangunan berpusat pada masyarakat menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi jika nilai tambah sosial dan budaya masyarakat memiliki kekuatan yang bila digali dan disalurkan akan merubah menjadi energi besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami.

Menurut Emil Salim Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada hakekatnya memiliki 2 pokok makna yaitu:

- a. meningkatkan kemampuan masyarakat Desa melalui pelaksanaan berberbagai program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan.

b. Memberikan wewenang secara proposional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan. Kemandirian masyarakat tidak berarti pemerintah akan membiarkan masyarakat berkembang tanpa ketetapan arah, tetapi pemerintah senantiasa responsif dalam mencermati permasalahan yang dihadapi masyarakat serta memberikan bantuan dan fasilitas agar masyarakat secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan. LPMD merupakan mitra yang membantu pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pengendalian pada masyarakat dan menyusun rencana pembangunan yang partisipasif, serta mendorong gerakan gotong royong. LPMD merupakan elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, serta bertujuan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dengan berupaya mewujudkan masyarakat yang partisipasif. Dimana LPMD dapat dilihat dari 4 fungsinya dengan mengkaji indikator yang ada di dalamnya yaitu:

1) LPMD sebagai Fasilitator

- a. Masyarakat turut ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan
- b. Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program penyelenggaraan pemerintahan

2) LPMD sebagai Mediator

- a. Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan
- b. Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program penyelenggaraan pemerintahan

3) LPMD sebagai Motivator

Masyarakat memanfaatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaannya

4) LPMD sebagai Dinamisator

- a. LPMD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
- b. LPMD melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Desa dan LPMD.

Dalam suatu pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Artinya, melalui partisipasi pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri, namun juga keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki (Menurut Aprillia Theresia, Krisnah dkk, pembangunan berbasis masyarakat, 2015:197). Partisipasi masyarakat merupakan suatu yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan dalam proses pembangunan, namun di dalam praktiknya,

tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh (Aprillia Theresia, Khisnha dkk, pembangunan berbasis masyarakat, 2015: 206) untuk mengetahui peran Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yakni sebagai fasilitator dan dinamisator sebagai berikut:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Fasilitator

LPMD sebagai fasilitator di desa adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Selain sebagai fasilitator LPMD juga mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat-perangkat RT dan RW di desa.

Agar dapat menjadi fasilitator yang baik ada beberapa hal yang dapat dilihat sebagai berikut:

a. Masyarakat Ikut Merencanakan Pembangunan

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa merupakan bentuk tanggung jawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di desa demi tercapainya pembangunan yang baik. Masyarakat ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa mereka dan juga harus bertanggung jawab dengan program yang telah mereka usulkan di dalam musrenbang di tingkat desa.

b. Masyarakat Ikut Dalam Merencanakan Prioritas Usulan Program

Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan ditingkat desa. Dalam ikut

menentukan prioritas usulan yang ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing desa untuk dilaksanakan.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Dinamisator

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, LPMD harus teliti dan bijaksana dalam memantau kegiatan pembangunan dengan cara menempatkannya di tengah-tengah masyarakat untuk mendorong masyarakat lebih berperan aktif di masing-masing lingkungan.

a. LPMD Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Program Pembangunan

Peran masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan merupakan keikutsertaan dari semua masyarakat dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan LPMD yang ditunjukkan dengan ikut bekerja maupun swadaya dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah yang menjadi prioritas di desa Leses sesuai kebutuhan masyarakat demi meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan.

Terkait dengan partisipasi masyarakat, 4 lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan yakni:

1) Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desanya perlu ditumbuhkan melalui forum yang memungkinkan masyarakat

berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program pembangunan di desa nya.

2) Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, perlu adanya pemerataan sumbangan kepada masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan bentuk lainya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga/ masyarakat.

3) Partisipasi Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat di perlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan.

4) Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan sukarela untuk memanfaatkan hasil pembangunan, misalnya memanfaatkan balai desa sebagai tempat pertemuan dan lain-lain.

Dari ke-4 partisipasi masyarakat di atas maka untuk dapat menciptakan pembangunan yang diinginkan maka perlu adanya peran serta masyarakat dalam berpartisipasi pada perencanaan maupun pelaksanaan suatu pembangunan seperti ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sendiri dijelaskan sebagai Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisien
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman dan
11. Partisipasif

Menurut Hanif Nurcholis (2011: 73) penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pemimpin, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas Seketaris Desa, yaitu staf atau pelayanan yang diketuai oleh Seketaris desa.
- c. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain
- d. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Berdasarkan uraian diatas penyelenggaraan Pemerintah Desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh seketaris, pengurus keagamaan, pengurus perairan dan kepala dusun sebagai pembantu disetiap kewilayahannya. Tidak lain dan tidak bukan bahwa kepala desa tidak mungkin mengurus urusan desa seorang diri maka dari itu peran pembantu kepala desa diatas sangat membantu kinerja kepala desa dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat desa.

5. Governance

Pada mulanya Word Bank mendefinisikan *governance* sebagai *the exercise of political power to manage a nations affair* artinya pelaksanaan kekuasaan politik untuk mengelola urusan akansi, yang kemudian diperjalas

menjadi *the way state power is used in managing economic and social resources of development of society* artinya cara kekuasaan negara digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial masyarakat (Sedermayanti, 2012). *Good governance* menurut Mardiasmo (2018: 23) adalah suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien. *Governance*, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Secara umum “*Governance*” dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dalam pengelolaan negara (tata kelola) yang mana didalamnya terdapat pengoperasian berbagai kewenangan, keterlibatan warga negara dan adanya interaksi dari berbagai institusi politik dalam membuat suatu keputusan. Dalam *governance*, pemerintah bukanlah satu-satunya aktor, namun masih banyak multi-stakeholder dalam *governance*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dikutip Lexiy J. Meleong (2002 :5) pendekatan

Kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data Deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan metode penelitian Kualitatif lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan. Erikson (1986) bahwa pengertian penelitian Kualitatif yang dikutip oleh Tantra yang memberikan batasan formal terkait pengertian penelitian Kualitatif yaitu suatu proses investigasi yang dilakukan secara intensip, dengan proses pencatata teliti terkait hal yang terjadi dilapangan, melalui suatu repleksi analitik terhadap dokumen, menyajikan bukti-bukti dan juga melaporkan terkait hasil analisis data secara deskripsif atau langsung dengan mengutip hasil wawancara maupun komentar *umanistic ive*.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini berlokasi di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Porvinsi Jawa tengah.

3. Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan fokus/ komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan agar data validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga. Dalam penelitian terkadang bingung masih membedakan objek penelitian, subjek penelitian, dan sumber data. Adapun unit analisis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan objek penelitian ialah yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989:622). Adapun yang menjadi objek penelitian ini yakni Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan dalam penelitian ini, informan adalah orang yang meberikan informasi tentang situasi dan kondisi di latar penelitian. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, maksudnya adalah teknik penentuan informan yang di dasarkan pada tujuan tertentu mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan apa yang di teliti.

Tabel 1. 1 Deskripsi Narasumber

No.	Nama	Jabatan	Jenis kelamin	umur	Pendidikan
1.	H. Puryanto	Kepala Desa	L	63	SLTP
2.	Fokus Wahyudi	Sekretaris Desa	L	35	Sarjana
3.	Bohyamin	Ketua LPMD	L	60	SLTA
4.	Krimanto	Kepala Dusun	L	56	SLTA
5.	Joko Kirmanto	Masyarakat	L	51	Sarjana
6.	Harji Estu	Masyarakat	L	46	SLTP
	Jumlah				6 orang

Daftar Narasumber tahun 2023

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Suyanto dan Sutinah 2005 bahwa metode pengumpulan data yang umum digunakan oleh penelitian sosial yaitu dengan observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan sehingga peneliti mendapat gambaran yang sesungguhnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh data serta informasi dari terwawancara (Arikunto 1993: 126). Teknik wawancara dilakukan yakni untuk mendapatkan data-data dalam bentuk percakapan langsung dengan narasumber yang menjadi objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menyalin atau mengumpulkan data dari catatan, buku, maupun arsip yang telah menjadi sebuah laporan yang dibutuhkan.

5. Teknik Analisis Data

(Bagdan dalam Sugiyono, 2014) mengartikan analisis data sebagai sebuah proses dalam mencari dan menyusun data yang dilakukan secara sistematis dimana data tersebut merupakan hasil wawancara, catatan dari lapangan serta bahan lainnya. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 133) menurutnya aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga satanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction* (Reduksi Data), data *display* (Penyajian Data), dan data *conclusion drawing/verification* (Penarik Kesimpulan). Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugioyo (2017: 135) mereduksikan data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah diredksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjunya, dan mencarinya bila diperlukan.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan (Miles dan Huberman, 1992:16-20)

3) *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi

apabila kesimpulan Yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan kredibel (Sugiyono, 2013:252).

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA LESES

A. Sejarah Desa Leses

Pada tahun 1901 seorang abdi dalem keraton surakarta yang bernama Kyai Noyo Dipo yang mengadakan tirakatan atau lelaku. Yang pada waktu itu dikuiti oleh dua abdinya. Tetapi sesampainya di perbatasan Yogyakarta hari sudah petang sehingga mereka menyempatkan untuk beristirahat dan bisa tidur dengan nyeyak sehingga tidak terasa hari sudah siang. Pada waktu itu Kyai Noyo Dipo bangun dan segera membangunkan kedua abdinya, selanjutnya berbicara pada abdinya tersebut: “hai kedua abdiku, bilamana nanti ada renjaning jaman, makan tempat ini saya beri nama Ngeles” setelah beberapa kurun waktu kemudiantempat tersebut menjadi hunian penduduk yang aman dan damai, sehingga saat ini bernama Desa Leses.

Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1942, Desa Leses di pimpin Demang Yang bernama Ki Demang Pairo Tanoyo, yang di bantu oleh perabot Desa, yaitu Jogo Boyo dan Kami Tuo. Kemudian pada tahun 1952 di ganti oleh Lurah Desa, yaitu yang bernama Dulhadi dan di bantu Carik Desa bernama Sastro Harjo dengan 3 kebayan dan Ulu-ulu. Berakhir pada tahun 1965 yang dilanjutkan oleh Carik Desa menjadi penjabat sementara Kepala Desa dan berakhir pada tahun 1974.

Kemudian pada tahun 1978 diadakan pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Bapak Puryanto yang berhasil menjabat kepala desa selama 2 (dua) periode dan berakhir pada tahun 2013. Untuk selanjutnya berdasarkan

hasil pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak se-kabupaten Klaten pada tahun 2019, kepemimpinan Desa Leses kembali di pegang oleh Bapak H. Puryanto sampai sekarang.

Tabel 2. 1 Kepala Desa yang Pernah Menjabat di Desa Leses

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1.	Kepala Desa I	Pairo Tanoyo	Tahun 1942 s/d 1953
2.	Kepala Desa II	Dulhadi	Tahun 1953 s/d 1965
3.	Pejabat Sementara Kepala Desa	Sastro Harjo	Tahun 1965 s/d 1974
4.	Kepala Desa III	Doelngalim	Tahun 1974 s/d 1986
5.	Kepala Desa IV	Tugiman	Tahun 1986 s/d 1998
6.	Kepala Desa V	H. puryanto	Tahun 1998 s/d 2013
7.	Kepala Desa VI	Purwanto	Tahun 2013 s/d 2019
8.	Kepala Desa VII	H. Puryato	Tahun 2019 s/d sekarang

Sumber: RPJMDes Desa Leses 2020

B. Geografi Desa Leses

1) Letak

Secara geografis Desa Leses terletak pada 6° 51' 46" L.S dan 109° 40' 19" LU sampai dengan 110° 03' 06" BT.

Secara administratif Desa Leses terbentuk dalam wilayah kecamatan Manisrenggo, topografi yang datar dengan kemiringan tanah rata-rata 10% - 20% dan berada pada ketinggian ± 600 mdpl, beriklim sejuk, rata-rata suhu 27°C serta curah hujan cukup tinggi rata-rata 3.000-3.500 mm per tahun.

Desa Leses yang masuk dalam wilayah kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- S: Selatan berbatasan dengan dengan Desa Taskombang dan Desa Kranggan Kecamatan Manisrenggo
- U: Utara berbatasan dengan Desa Kepurun dan Desa Sapen kecamatan Manisrenggo
- B: Barat berbatsan dengan Daerah Istimewah Yogyakarta
- T: Timur berbatasan dengan Desa Kebonallas Kecamatan Manisrenggo.

2) Luas

Wilayah Desa Leses dengan total luas $\pm 151,8480$ Ha terdiri dari:

- Pemukiman : 31,9625 Ha
- Sawah $\frac{1}{2}$ irigasi teknis : 116,0000 Ha
- Sawah tanda hujan : - Ha
- Perkebunan rakyat : - Ha
- Perkantoran : 0,1000 Ha
- Sekolah : 0,2000 Ha
- Kolam : 0,2000 Ha

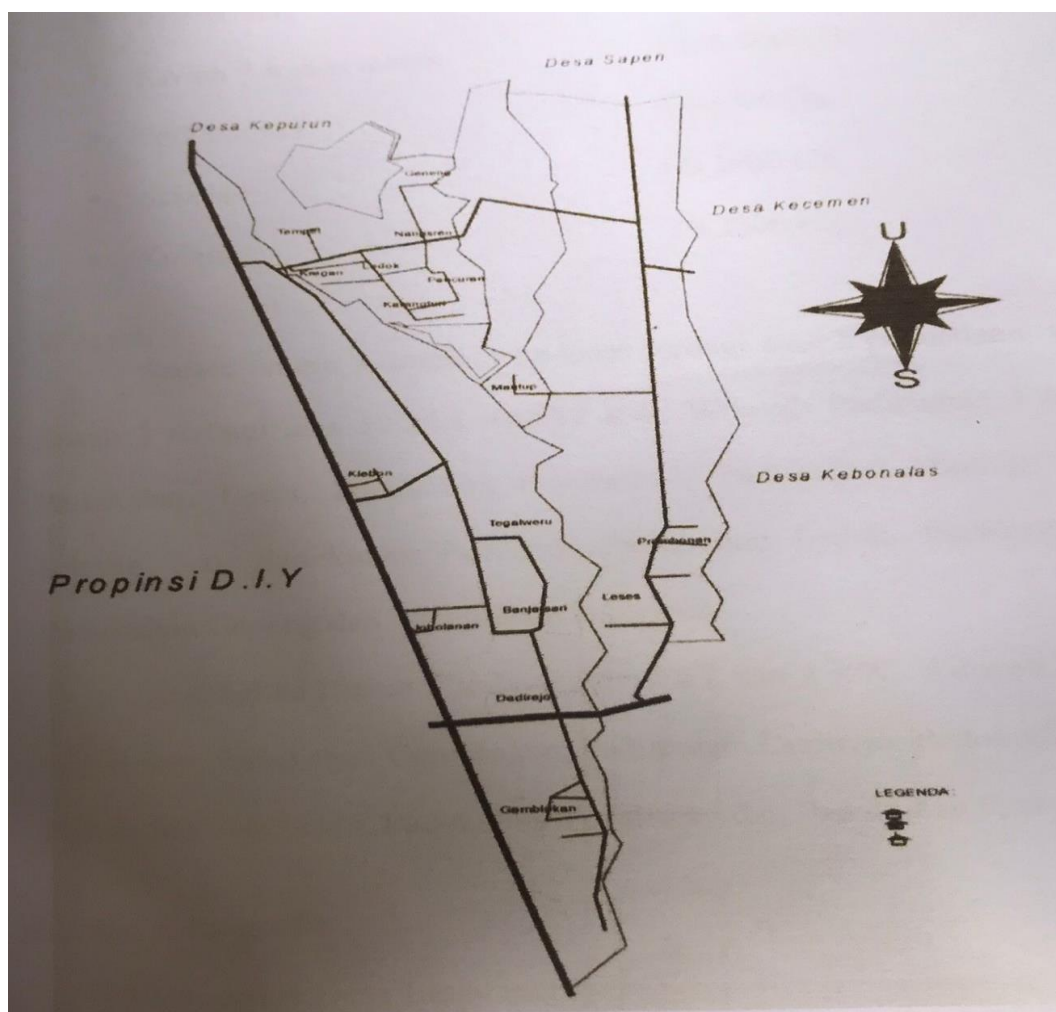
3) Wilayah

Tabel 2. 2 Desa Leses yang Memiliki Wilayah Bawahan Sejumlah 2 (dua) Dusun

No	Wilayah/ Dusun	Nomor RW	Nomor RT	Nama Dukuh
1.	DUSUN 1	05	08	Leses
			09	Leses
		06	10	Prambonan
			11	Prambonan
		07	12	Mantup
		08	13	Pancuran
		09	14	Karangturi
		09	15	Karangturi
		10	16	Ledok
			17	kregan
			18	Ledok
		11	19	Tempel
			20	Tempel
			21	Tempel
		12	22	Geneng
			23	Geneng
13	24	Nangsren		
2.	DUSUN 2	01	01	Gamblokan
			02	Gamblokan
			26	Dadirejo
		02	03	Jobolanan
		03	04	Banjarsari
			05	Banjarsari
			06	Tegalweru
04	07	Klebon		

Sumber: RPJMDes Desa Leses 2022

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Desa Leses



Sumber: Peta Desa Leses tahun 2020

C. Kondisi Demografi

Masyarakat Desa Leses merupakan komunitas masyarakat yang membaur dalam suasana kehidupan yang baik dan harmonis serta memiliki rasa kekeluargaan yang cukup tinggi hal ini di dukung dengan kegiatan sosial yang di miliki berupa kegiatan keagamaan di lingkungan masjid atau mushola di masing-masing-masing wilayah, pengayuban rutin tokoh masyarakat di setiap dusun, pertemuan rutin warga atau selapanan di tingkat RW, adanya pertemuan rutin Karang Taruna di tingkat desa dan organisasi kepemudaan di

tingkat RW, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, serta dilestarikanya kegiatan gotong royong dan adat istiadat di kalangan masyarakat serta di dorong dengan rasa kebersamaan yang kuat.

1. Jumlah Penduduk

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	RW	RT	Dukuh	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	DUSUN 1	05	08	Leses	34	32	66
			09	Leses	42	47	86
		06	10	Prambonan	71	66	137
			11	Prambonan	76	72	148
		07	12	Mantup	45	37	82
		08	13	Pancuran	62	58	120
		09	14	Karangturi	35	39	74
		09	15	Karangturi	34	32	66
		10	16	Ledok	42	48	90
			17	Kregan	46	40	86
		11	18	Ledok	44	38	82
			19	Tempel	49	49	98
			20	Tempel	39	38	82
		12	21	Tempel	46	37	77
			22	Geneng	46	44	90
		13	23	Geneng	59	52	111
			24	Nangsren	60	60	120
		2.	DUSUN 2	01	01	Gamblokan	83
02	Gamblokan				108	104	212
26	Dadirejo				26	34	60
02	03			Joholanan	105	107	212
	04			Banjarsari	71	71	142

		03	05	Banjarsari	45	44	89
			06	Tegalweru	34	30	64
		04	07	Klebon	71	58	129
Total					1.373	1.326	2.699

Sumber: RPJMDes Desa Leses 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di tahun 2019 menunjukkan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 Tahun	81	69	150
2.	5-9 Tahun	98	88	184
3.	10-14 Tahun	100	81	181
4.	15-19 Tahun	85	74	159
5.	20-24 Tahun	93	86	179
6.	25-29 Tahun	86	77	163
7.	30-34 Tahun	114	82	196
8.	35-39 Tahun	119	120	239
9.	40-44 Tahun	106	101	207
10.	45-49 tahun	97	110	207
11.	50-54 Tahun	91	100	191
12.	55-59 Tahun	72	108	180
13.	60-64 Tahun	86	68	154
14.	65-69 Tahun	48	68	154
15.	70-74 Tahun	40	44	86
16.	>=75 Tahun	59	72	131
Total		1.272	1.326	2.699

Sumber: RPJMDes Desa Leses 2020

Berdasarkan tabel di atas, usia 35-39 Tahun paling banyak dengan jumlah 239 orang dan paling sedikit yakni usia 70-74 Tahun dengan jumlah 86 orang.

3. Tingkat Pendidikan

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/ belum sekolah	261	278	539
2.	Belum tamat SD/ Sederajat	129	118	247
3.	Tamat SD/ Sederajat	262	285	547
4.	SLTP/ Sederajat	213	231	444
5.	SLTA/ Sederajat	466	366	835
6.	Diploma I/ II	7	10	17
7.	Akademik/ Diploma III/ Sarjana muda	10	12	22
8.	Diploma IV/ Strata I	23	23	46
9.	Strata II	2	-	2
10.	Strata III	-	-	-
Total		1.373	1.326	2.699

Sumber: RPJMDes Desa Leses 2020

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya penduduk tamat SLTA/ Sederajat dan SD/ Sederajat lebih banyak di bandingkan dengan penduduk di tingkat pendidikan lainnya.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	jumlah
1.	Islam	2.679
2.	Kristen protestan	15
3.	Khatolik	5
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

6.	Penganut aliran kepercayaan	-
Total		2.699

Sumber: RPJMDes Desa Leses tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Leses mayoritas penduduk nya menganut agama Islam yakni sebesar 2.679 orang, kepercayaan agama Kristen Protestan sebanyak 15 orang dan agama Katholik 5 orang.

D. Kondisi Ekonomi

Gambaran umum kondisi ekonomi masyarakat Desa Leses dapat di lihat dari banyak sisi yakni potensi sumber daya yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan sumber daya prasarana dan sarana.

Potensi sumber daya alam berupa hasil pertanian dan perkebunan merupakan potensi sumber daya unggulan dari desa yang mendominasi aktifitas masyarakat hampir 80% masyarakat Desa Leses adalah petani, buruh tani, peternak sapi peternak ikan, peternak ayam, dan sebagainya adalah pedagang dan pegawai sipil.

Pada tahun 2020 ini hasil produksi pertanian hampir sama dengan tahun-tahun lalu yakni cukup baik. Sebagai dampak dari keberhasilan panen ini pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi sangat baik dan berdampak pada angka kemiskinan serta pengangguran semakin menurun yakni berdasarkan daftar Keluarga Penerima Program Rastrea atau Bantuan Pangan Non tunai

sejumlah 133 KK. Mata pencaharian masyarakat Desa Leses fapat dilihat dari tabel di bawah ini:

1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2020:

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/ Tidak Bekerja	279	229	508
2.	Mengurus Rumah Tangga	-	394	394
3.	Pelajar/ Mahasiswa	204	168	372
4.	Pengawai Negri Sipil	14	17	31
5.	Tentara Nasional Indonesia	4	-	4
6.	Kepolisian RI	2	-	4
7.	Perdangang	20	27	47
8.	Petani/ Pekebun	93	35	128
9.	Peternak	2	-	2
10.	Tranportasi	7	-	7
11.	Karyawan Swasta	106	66	172
12.	Karyawan BUMN	3	-	3
13.	Karyawan BUMD	1	-	1
14.	Karyawan Honoror	2	5	7
15.	Buruh Harian Lepas	390	214	604
16.	Buruh Tani/ Perkebun	119	100	219
17.	Pembantu Rumah Tangga	-	3	3
18.	Tukang Batu	22	-	22
19.	Tukang Kayu	6	-	6
20.	Tukang Las/ Pandai Besi	1	-	1
21.	Tukang Jahit	4	3	7
22.	Penata Rambut	-	1	1
23.	Mekanik	4	-	4
24.	Paraji	-	1	1
25.	Dosen	-	1	1
26.	Guru	-	5	5
27.	Bidan	-	1	1
28.	Sopir	4	-	4
29.	Pedagang	12	33	45
30.	Perangkat Desa	5	2	7
31.	Kepala Desa	1	-	1

32.	Wiraswasta	42	15	57
33.	Lainnya	3	3	6
	Total	1.373	1.326	2.699

Sumber: RPJMDes Desa Leses 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan yang banyak yakni Buruh Harian Lepas dengan 604 orang data ini di ambil pada tahun 2020.

E. Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan BPD. Hubungan kerja antara pemerintah Desa dan BPD bersifat kemitraan dan koordinatif.

Sesuai dengan Peraturan Desa Leses Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeritahan Desa Leses, yang merupakan tindak lanjut atau peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Leses menerapkan susunan organisasi dengan pola minimal, yakni terdiri dari:

- a) 1 (satu) orang Kepala Desa,
- b) 3 (tiga) orang dari unsur Seketaris Desa, yakni Seketaris Desa, Kepala Urusan Keuangan serta Kesejahtraan Urusan Perencanaan dan umum,
- c) 2 (dua) orang dari unsur Pelaksana Teknis, yakni Kepala Seksi Pemerintahan serta Kepala Seks Kesejahtraan dan Pelayanan,
- d) 2 (dua) orang unsur Pelaksana Kewilayahan, yakni Kepala Dusun 1 dan Kepala Dusun 2, sehingga aparatur Pemerintah Desa Leses berjumlah 8 (delapan) orang.

1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Leses

Tabel 2. 8 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Leses Saat ini

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan
1.	H. Puryanto	Klaten, 01 Januari 1959	Kepala Desa
2.	Fokus Wahyudi	Klaten, 02 Mei 1987	Sekretaris Desa
3.	Eko Marjono	Klaten, 17 Desember 1972	Kaur Perencanaan Dan Umum
4.	Sri Gunung Prapnaningtyas	Kulongprogo, 17 Desember 1993	Kaur Keuangan
5.	Sularta	Klaten, 15 Februari	Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan
6.	Meyta Mafilindati	Klaten, 18 Mei 1992	Kasi Pemerintahan
7.	Krimanto	Klaten, 16 Mei 1967	Kepala Dusun 1
8.	Heru Widodo	Kalten, 17 Maret 1973	Kepala Dusun 2

Sumber: RPJMDes Desa Leses tahun 2020

2. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tabel 2. 9 Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Jabatan
1.	Brahim, S.Ag., M. Pd	Ketua
2.	Siswadi	Wakil
3.	Dwi Budi	Sekretaris
4.	Tongki Ari	Anggota
5.	Yohanes Budi	Anggota
6.	Puryanto	Anggota
7.	Subani	Anggota

Sumber: RPJMDes Des Leses Tahun 2020

3. Visi Dan Misi Desa Leses

A. Visi

“Mewujudkan Desa Leses Yang Agamis, Aman, Bermartabat, Sehat Dan Sejahtera”.

B. Misi

- 1) Mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, bersih dan berwibawa.
- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang maju dan mandiri.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal.
- 5) Meningkatkan keamanan dan keterlibatan masyarakat sesuai kaidah hukum dan norma yang berlaku.
- 6) Mengedepankan kepedulian sosial masyarakat dengan semangat kegotong-royongan guna mencapai kesejahteraan umum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Interaksi Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Kerja sama yang baik pemerintah desa dengan LPMD dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat desa memberikan banyak dampak positif terciptanya hubungan yang harmonisasi dan kerja sama yang baik dengan BPD, atau pun LPMD itu sendiri. Komunikasi berperan sangat penting karena bertujuan untuk menyampaikan aspirasi atau gagasan guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama-sama hal tersebut tidak lepas dari rutinnnya pertemuan, dan rapat untuk menyatukan pendapat antara Pemerintah Desa dengan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Pelaksanaan *Good Governnace* dengan cara menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada perangkat desa dengan tujuan memajukan desa dan kepentingan bersama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan di desa dapat terwujudkan, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.


Menjalin suatu relasi atau hubungan antara kelompok dengan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu sangatlah tidak mudah dalam kehidupan sehari-hari karna ada banyak gejolakan dan perbedaan, hal tersebut bisa terjadi karna

kurang nya relasi atau hubungan yang baik dalam kehidupan sehari. Desa leses kita melihat bahwa hubungan antara pemerintah desa dan LPMD sudah dikatakan baik untuk desa leses namun masyarakat di yang kurang aktif dalam partisipasi pengambilan kebijakan dan menentukan keputusan secara bersama hal itu menjadi masalah yang harus di selesaikan oleh pemerintah desa agar kedepanya masyarakat ikut bersama-sama guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*.

B. Saran

Sebaiknya Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) melakukan pemberdayaan dan meningkatkan sumber daya manusia melalui forum atau sosialisasi di desa agar musyawarah kedepannya lebih baik dan bermanfaat untuk Desa Leses.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

No	Gambar	Keterangan
1.		<p>Wawancara bersama Bapak H. Puryanto selaku kepala Desa Leses.</p>

2.		<p>Wawancara bersama Bapak Fokus Wahyudi selaku Sekertaris Desa Leses.</p>
3.		<p>Setelah wawancara bersama Bapak Krismanto selaku Kepala Dusun Desa Leses.</p>
4.		<p>Wawancara bersama Bapak Bohyamin selaku Ketua LPMD Desa Leses.</p>

5.		<p>Setelah wawancara bersama Bapak Joko Kirmanto selaku warga Desa Leses Padukuhan Dadirejo.</p>
6.		<p>Setelah wawancara bersama Bapak Harji Estu Kahono selaku warga Desa Leses Padukuhan Jaholanang.</p>

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. S. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: P.T Rineka Cipta.
- Ariyanto Fratama (2021). *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Fisik*. Kutai Timur, kalimantan timur. Institu Pemerintahan Dalam Negeri.
- Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, dan Trisakti Handayani (2019). *Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*. Malang Bululawang. Jurnal Civic Hukum
- Didik G. Suharto. (2012) *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Adminitrasi And Political Decentralization*. Jurnal Bina Praja.
- Fatimah Azis dan Irmawati (2021). *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Goestyari Kurnia Amantha (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Universitas Muhammadiyah Lampung.
- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Haryanto, Dany dan Nugroho, G. Edwi. (2011). *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Homans (2004). *Interkasi Sosial*. Jurnal Komunikasi. Politik dan Sosiologi.

- Meleong, J, Lexy. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (Diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohendi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muhlis Madani (2011). *Dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan. Kebijakan publik*. Delta Buku, Yogyakarta.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance. Pemerintahan Yang Baik*. Bagian Kedua Revisi. Bandung. CV Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2007) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali press
- Soekanto, Soerjono. (2012) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif. Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suhendra. (2003) lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau LPMD.

Sumber Lain/ Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat

Sumber Internet

<https://ngestiharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/1248-LPMD---Pengertian--Tugas-->

[Fungsi-Kewajiban](#)

<https://desa-sukadana.kuningankab.go.id/lembaga/lembaga-pemberdayaan->

[masyarakat-lpm](#)

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>

<https://desa-sukadana.kuningankab.go.id/lembaga/lembaga-pemberdayaan->

[masyarakat-lpm](#)

<https://adjar.grid.id/read/543574084/7-pengertian-interaksi-sosial-menurut-para->

[ahli?page=all](#)

LAMPIRAN
PANDUAN WAWANCARA
INTERAKSI PEMERINTAH DESA DENGAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN
Untuk Pemerintah Desa

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Jabatan/ pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana relasi pemerintah desa dengan LPMD dalam penyelenggaraan pemerintahan?
2. Bagaimana cara pemerintah desa agar hubungan dengan LPMD tetap intens atau terjaga dengan baik?
3. Bagaimana pemerintah desa dengan LPMD mewujudkan program sesuai dengan apa yang di perlukan masyarakat?
4. Apakah pernah ada bentuk penolakan, protes, dan perlawanan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan?
5. Apakah pemerintah desa Rutin mengadakan pertemuan dengan LPMD?
6. Apakah Pemerintah Desa dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan masyarakat ikut andil?

7. Apakah pernah Pemerintah Desa mengadakan suatu program/ kegiatan namun partisipasi masyarakat kecil?
8. Apa saja kendala Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
9. Apakah pernah Pemerintah Desa dan LPMD terjadi Miscom (mis komunikasi) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan?
10. Bagaimana cara Pemerintah Desa mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik?

PANDUAN WAWANCARA
Untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan/ pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana interaksi pemerintah desa dengan LPMD sejauh ini dalam penyelenggaraan pemerintahan?
2. Bagaimana relasi LPMD dengan pemerintah desa?
3. Bagaimana cara LPMD menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah desa?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang diadakan pemerintah desa?
5. Apakah ada bentuk partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan mengevaluasi program kegiatan terkait penyelenggaraan pemerintahan?
6. Bagaimana relasi LPMD dengan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan?
7. Bagaimana LPMD meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau terlibat aktif dalam kegiatan yang di adakan desa?
8. Apakah kendala LPMD dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

PADUAN WAWANCARA
Untuk Masyarakat Desa Leses

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan/ Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa saja upaya yang dilakukan LPMD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?
2. Apakah masyarakat pernah mengikuti rapat yang diadakan LPMD atau pemerintah desa?
3. Apakah masyarakat ikut andil dalam membuat keputusan dan kebijakan?
4. Apakah masyarakat hanya mengikuti atau menentukan arah kebijakan dari Pemerintah Desa dan LPMD atau ikut andil dalam menentukan kebijakan juga?
5. Bagaimana cara LPMD agar masyarakat mau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
6. Apakah program yang dibuat pemerintah desa dan LPMD sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat?



Lumbang Desa STPMD "APMD"
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho 317 Gondokusuman Yogyakarta 55225
Email: perpusapmd@gmail.com telp/WA: 0851-7320-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbang Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah: RAY PALMER

Judul makalah: INTERAKSI PEMERINTAH DESA DENGAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN
(Studi Kasus Desa Leses Kecamatan Manisrenggo
Kabupaten Klaten
Provinsi Jawa Tengah)

Tanggal pemeriksaan: 12 Mei 2023

Persentase plagiasi: 16%

Petugas: Checked By:
Bagus Prasetyo





SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775. Fax. (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

Nomor : 214/PEM/J/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si.

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ray Palmer
No. Mahasiswa : 19520118
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022
Judul Proposal : Interaksi Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail info@apmd.ac.id

Nomor : 125/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten
Di Tempat

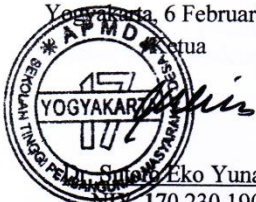
Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 7 Februari 2023 . Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Ray Palmer
No Mhs : 19520118
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Interaksi Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Tempat : Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten
Dosen Pembimbing : Drs. R.Y Gatot Raditya, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 6 Februari 2023
Ketua

Drs. Sutopo Eko Yunanto
NIP. 170 230 190



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 068/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Ray Palmer
Nomor Mahasiswa : 19520118
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-I).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten
b. Sasaran : Interaksi Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
c. Waktu : 7 Februari 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 6 Februari 2023



PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015)

Alamat: Jl. Timoho No. 317, Yogyakarta 55225 | Telp: (0274) 561971, 550775 | Fax: (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ray Palmer
Nomor Mahasiswa : 19520118
Judul : Integrasi pemerintahan desa dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dosen Pembimbing :
Mulai Bimbingan :

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
01/11/2022	Konsultasi pengesahan latar belakang	01
08/11/2022	Konsultasi latar belakang	02
15/11/2022	Revisi latar belakang	03
1/12/2022	Konsultasi bab I, proposal	04
5/12/2022	Revisian bab I proposal	05
8/12/2022	revisian bab I & membuat daftar pertanyaan	06
12/12/2022	Revisi daftar pertanyaan	07
14/12/2022	Revisian Daftar pertanyaan	08
24/01/2023	Revisi Daftar pertanyaan	09
27/Jan/2023	ACC proposal	10
18/April/2023	Konsul skripsi	11

28/04/2023	Bimbingan Skripsi	GA
9/05/2023	Bimbingan skripsi	GA
11/05/2023	GA Bimbingan	GA
		GA

Mengetahui / Menyetujui
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi :

Dosen Pembimbing :

.....

.....